

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki kontribusi sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari total pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dari penerimaan dalam negeri pada 2016 hanya senilai Rp. 1.546,9 triliun atau hanya 86,7% dari target APBN – P 2016. Menurut Bank Indonesia, kekurangan tahun 2016 yang mencapai Rp. 254 triliun dari target, terhitung lebih tinggi angka kekurangannya dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 249 triliun. Penerimaan pajak tahun 2016 hanya tumbuh 3,6 % dari tahun 2015, hal ini terhitung lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2015 yaitu 8,2%. Penurunan penerimaan pajak dalam negeri tahun 2016 dipengaruhi oleh penurunan PPh Migas, PPN dan PBB. Penerimaan pajak PPh nonmigas masih mencatat pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2015 (*Annual Report*, BI, 2012 – 2016).

Peran pajak bagi pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Bagi perusahaan, pajak diasumsikan sebagai biaya yang akan mempengaruhi laba ataupun sebagai distribusi laba yang akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (Suandy, 2008).

Berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan akan menjalankan usahanya untuk mencapai laba setinggi – tingginya dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam mengurangi biaya pajak karena menganggap bahwa pajak tersebut akan memperkecil laba bersih. Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) dalam Purwanto (2016), agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Terkait kasus penghindaran pajak dalam skala besar yang pernah terjadi di Indonesia yakni perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie. Direktorat Jenderal Pajak dibawah kepemimpinan Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan adanya kurang bayar pajak dari ketiga perusahaan tersebut, yaitu KPC senilai Rp 1.5 triliun, Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin US\$ 27,5 juta. Tunggalan itu merupakan nilai SPT pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007 (BeritaSatu, 2010). Kasus *Panama Papers* yang berisi data informasi sejak 1977 hingga awal 2015 dengan total catatan mencapai 11,5 juta dokumen mengungkap sebanyak 214.488 perusahaan *offshore* di lebih dari 200 negara dan teritori. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa praktik – praktik kotor penghindaran dan pengelakan pajak telah menjadi ancaman serius bagi negara (Tempo, 2016). Kemudian berdasarkan laporan yang dibuat bersama oleh penyidik dari IMF dan Universitas PBB pada tahun 2016 dengan menggunakan *database International Center for Policy and Research*

(ICPR) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) diperoleh data penghindaran pajak pada perusahaan di 30 negara dan Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar AS per tahun (Tribunnews, 2017).

Berdasarkan fenomena terkait kasus penghindaran pajak diatas, menunjukan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya. Perilaku yang demikian dapat mendorong wajib pajak khususnya badan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik itu dari segi keuangan, tanggung jawab sosial, ukuran dari perusahaan maupun tata kelola perusahaan.

Dari segi keuangan dapat dilihat dari rasio likuiditas dan *leverage*. Menurut hasil penelitian Anita M (2015) dan Purwanto (2016) menunjukan bahwa perusahaan dengan kondisi likuiditas yang rendah cenderung akan berperilaku agresif terhadap pajak supaya perusahaan dapat mempertahankan arus kasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) dan Purwanto (2016) menunjukan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi akan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak bahkan cenderung mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian Suprimarini dan Suprasto H (2017) tingginya nilai pengungkapan CSR dapat meningkatkan

nilai ETR perusahaan yang selanjutnya akan menurunkan nilai agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Rahmawati et al, (2016) dan Hidayati (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat meningkatkan penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan memanfaatkan biaya – biaya tersebut untuk meminimalkan beban pajak bahkan cenderung mengarah pada tindakan agresif.

Keterlibatan perusahaan yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas selain yang diatas adalah ukuran perusahaan. Menurut hasil penelitian Kamila (2013) serta penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak.

Faktor lain yang dapat berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak adalah tata kelola perusahaan. GCG dalam penelitian ini diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain, semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kecil agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga manajemen akan berhati – hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan.

Adanya hubungan antara likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak, serta adanya *research gap* antara hasil penelitian sebelumnya memotivasi penulis untuk mengkaji kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini termotivasi oleh penelitian terdahulu yang memberikan hasil beragam serta menindak lanjuti keterbatasan – keterbatasan yang terjadi pada penelitian terdahulu. Penelitian ini mereplikasi penelitian Anita M (2015) dengan judul yaitu, Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Real Estate* Dan *Property* yang terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2013.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penulis menambahkan satu variabel independen yaitu komisaris independen, karena variabel ini masih jarang dilakukan penelitian serta berdasarkan saran dari peneliti terdahulu perlu untuk dilakukan penelitian untuk mendapat hasil yang lebih akurat. Dan penelitian ini menggunakan data lima tahun terakhir yaitu pada periode 2012 – 2016. Pemilihan sektor pertanian dan pertambangan dalam penelitian ini ialah supaya hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Sektor pertanian dan pertambangan juga merupakan industri pengelola sumber daya alam di Indonesia yang memiliki pengaruh besar bagi penerimaan negara. Selain sebagai negara dengan kekayaan alamnya yang melimpah tidak menjadikan Indonesia luput akan jerat kemiskinan yang cukup parah. KPK (2015)

mengungkapkan kerugian dari penerimaan negara yang tidak dibayar oleh sektor kehutanan sejak tahun 2003 hingga 2014 mencapai 7,24 triliun per tahun (*Annual Report*, ICW, 2016). Data Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa *tax ratio* nasional mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2016, dari 11,9 % hingga 10,4% dan salah satunya dipengaruhi oleh PPh migas (*Annual Report*, BI, 2012 – 2016). Data pertumbuhan penerimaan pajak PPh Migas sejak 2012 hingga 2016 menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2013 sebesar 6,33% tetapi selalu mengalami penurunan fluktuatif pada tahun berikutnya, yaitu turun sebesar 5,47% pada tahun 2014, 40,79% pada tahun 2015 dan 26,83% pada tahun 2016. Berbeda dengan PPh non migas yang selalu mengalami kenaikan fluktuatif dari 2012 hingga 2016, yaitu naik sebesar 10,25% pada tahun 2013, 16,63% pada tahun 2014, 13,72% pada tahun 2015 dan 48,29% pada tahun 2016 (BPS, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini berusaha menemukan bukti – bukti empiris mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Maka dari itu, berdasar latar belakang penelitian diatas penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat krusial untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan perusahaan terkait pajak menimbulkan niat bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar karena dianggap mengurangi laba yang diperoleh. Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan komisaris independen. Tindakan agresif yang tinggi terhadap pajak pada perusahaan dapat menimbulkan adanya kerugian penerimaan negara bagi pemerintah, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?
6. Apakah likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016.
2. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016.

3. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016.
4. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016.
5. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016.
6. Untuk menguji, mengetahui dan membuktikan pengaruh likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung terutama dalam perkembangan ilmu

pengetahuan di Indonesia. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wacana penelitian serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak regulator, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadai wacana dalam mengidentifikasi risiko penghindaran pajak perusahaan.
3. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan.
4. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengelola kebijakan perusahaan agar lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini disusun secara terperinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, data penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data yang diolah serta pembahasan data penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta saran penulis bagi pembaca, praktisi dan juga bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang diharapkan mampu memberikan manfaat.